

**MODEL PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUH
PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA USAHATANI
DI PROVINSI JAWA TENGAH – INDONESIA**

Oleh

Sucihatningsih DWP, Indah Susilowati, Waridin, Mudjahirin Thohir

Juli 2010

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi kinerja atau peran penyuluh pertanian lapangan dalam peningkatan produksi pertanian tanaman pangan unggulan di Jawa Tengah, (2) merumuskan model penguatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian lapangan di Jawa Tengah, (3) mengestimasi biaya transaksi yang diperlukan untuk merevitalisasi kegiatan penyuluh pertanian lapangan. Kabupaten Grobogan, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang diambil sebagai kabupaten model yang mewakili kinerja usahatani biji-bijian, padi-padian dan sayur-sayuran di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan *key-persons*. Dengan *multistages sampling* dipilih 200 petani dan 30 penyuluh pertanian. Data sekunder runtut waktu yang relevan dan data sekunder lainnya dari jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan telah dipakai untuk memperkaya penelitian ini. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil responden, kinerja penyuluh, dan pengestimasian biaya transaksi untuk melaksanakan skenario model revitalisasi kelembagaan penyuluhan guna penguatan kapasitas penyuluh untuk meningkatkan kinerja usahatani.

Perilaku usahatani di daerah penelitian ditemukan belum efisien, sehingga masih ada peluang untuk mengoptimalkan produksi usahatani melalui penyuluhan. Kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Klaten tergolong sedang dan Kabupaten Magelang tergolong rendah. Hal ini disebabkan jumlah penyuluh di daerah penelitian masih kurang dan keahlian penyuluh belum sesuai dengan tuntutan polivalen yaitu menguasai beberapa bidang penyuluhan yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Penelitian ini menyajikan 3 skenario kelembagaan penyuluhan pertanian (1) model sentralisasi, (2) model desentralisasi (*existing model*), (3) model skenario peneliti (*proposed model*) yang dimodifikasi dari model desentralisasi dan revitalisasi kelembagaan penyuluhan. Biaya model sentralisasi lebih rendah daripada model desentralisasi. Namun, biaya transaksi yang dikeluarkan untuk menjalankan skenario revitalisasi penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian jauh lebih tinggi yaitu sebesar 110 milyar

rupiah. Biaya transaksi per unit yang dibutuhkan untuk merevitalisasi kelembagaan penyuluh pertanian tingkat nasional (26 milyar), provinsi (32 milyar), kabupaten/kota (700,3 juta) dan kecamatan (51 juta). Pada tingkat nasional, biaya transaksi sebagian besar digunakan untuk operasional & *maintenance* dan *establishment*, sedangkan di tingkat provinsi paling besar digunakan untuk biaya operasional & *maintenance*, di kabupaten/kota digunakan untuk biaya *establishment*, sedangkan di tingkat kecamatan biaya dibutuhkan untuk pembuatan keputusan dan operasional & *maintenance*. Secara keseluruhan, biaya transaksi sebagian besar digunakan untuk biaya operasional & *maintenance* dan biaya *establishment*. Dalam rangka merevitalisasi penguatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Jawa Tengah, skenario 3 ini tidak mudah untuk diimplementasikan, tetapi apabila ingin mengubah kinerja agribisnis yang lebih baik di daerah penelitian, maka usulan yang dirumuskan, perlu di pertimbangkan dengan melibatkan semua *stakeholders*.

Kata kunci: penguatan, kapasitas, pertanian, penyuluhan, kelembagaan, biaya transaksi, Jawa Tengah, Indonesia.